

**POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ISTRI KEDUA**
(Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung
Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ISMAIL

NPM: 1421010035

Jurusan: Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan terdapat suatu permasalahan dalam hak pembagian harta waris antara istri pertama dan istri ke dua (yang menikah sirri). Terdapat sengketa mengenai harta warisan pada kasus Almarhum Tony Candra Pada pernikahan tersebut dengan istri keduanya tanpa seizin dari istri pertamanya yang sah, dengan kata lain almarhum Tony Candra dan istri kedua telah melanggar Pasal 5 ayat 1 poin (a) Undang-undang Perkawinan yang mengatur harus adanya persetujuan dari istri/istri-istri dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini: 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri kedua? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri kedua?. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu digunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, Fiqh Munakahat, KHI, dan hukum perkawinan adat yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan dalam Islam dan hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa : Poligami tanpa izin istri pertama dan pembagian hak waris istri kedua dalam kasus Tony Candra di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berlangsung secara damai dan diselesaikan melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan ketika ia masih hidup dan walaupun menurut hukum positif poligami tersebut tidak sah karena tidak didaftarkan di KUA serta tidak memiliki izin dari istri pertama, sehingga pembagian hak waris tersebut berakibat tidak dipandang sebagai sah istri dan tidak berhak waris. Dilihat dari perpektif hukum Islam kasus diatas Tony Candra dapat dikatakan sah perkawinannya karena memang dalam hukum Islam tidak ada ketentuan harus didaftarkan dilembaga resmi cukup selama perkawinan tersebut dihadiri oleh kedua mempelai lalu ada dua wali, dan tiga orang saksi dari pihak-pihak keluarga maka perkawinan tersebut sudah bisa dianggap sah dan berakibat bahwa istri yang kedua,walaupun dinikahi tanpa izin istri pertama tetap saja perkawinannya sah dan dia berhak untuk memperoleh pembagian waris,hanya saja dalam kasus ini Tony Candra pembagian hak waris tidak dilangsungkan melalui tata cara yang disebutkan dalam Islam (1/8) tetapi dilakukan berdasarkan surat wasiat dan itu diterima oleh kedua belah pihak maka itupun berlaku.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Tlp. (07217) 703260*

P E R S E T U J U A N

Judul Skripsi : Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Nama Mahasiswa : Ismail

NPM : 1421010035

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

M E N Y E T U J U I

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II,

Abdul Qadir Zaelani, S.H., M.A.
NIP. 198206262009011015

Ketua Jurusan

Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Tlp. (07217) 703260*

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **“Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”**. Disusun Oleh: **ISMAIL**, NPM: **1421010035**, Jurusan : **Al Ahwal Al Syakhsiyyah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah fakultas Syari’ah pada :

Hari/tanggal : **Jumat 24 Januari 2020**
Waktu : **08.30-10.30 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang III Fakultas Syari’ah**

TIM MUNAQOSAH

Ketua sidang : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)
Sekretaris : **Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** (.....)
Penguji I : **Dra. Firdaweri, M.H.I.** (.....)
Penguji II : **Drs. Henry Irwansyah, M.A.** (.....)
Penguji III : **Abdul Qodir Zaelani, S.H, M.A.** (.....)

**Mengatahui/
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 19621022199303102

MOTTO

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau seduah dibayar hutangnya. (QS. An-Nisaa (4) :12)

RIWAYAT HIDUP

Ismail dilahirkan di Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juli 1995, anak ke Lima dari 5 bersaudara, dari pasangan Ayah yang bernama Madnusi dan Ibu bernama Saiyah. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD N 1 Kalianda tahun 2008, Melanjutkan di MTs Negeri Kalianda selesai pada tahun 2011 lalu melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Kalianda 2014, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pada perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah hingga selesai.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis

Ismail
NPM: 1421010035

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bersusah payah memperjuangkan dan memberikandukungan akan keberhasilankudan mendidik serta mendo'akan gerak langkahku dalam mencapai tujuan hidup di dunia dan akherat kelak.
- 2 Kakak yang telah ikut mendo'akan dan memberi semangat akan keberhasilanku.
- 3 Semua sahabat setiaku yang selalu membantu serta memberikan dorongan akan keberhasilanku.
- 4 Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang akan selalu ku kenang.

Bandar Lampung, Austus 2019
Penulis

I s m a i l
NPM: 14210121035

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan seperti apa yang diharapkan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
2. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
3. Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H., M.A. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariahyang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah meminjamkan buku guna keperluan ujian.
6. Rekan-rekan yang telah memberi bantuan baik petunjuk atau berupa saran-saran, sehingga penulis senantiasa mendapat informasi yang sangat berharga.

Semoga amal baik Bapak, Ibu dan rekan–rekan semua akan diterima oleh Allah SWT dan akan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Agustus 2019
Penulis

I s m a i l
NPM: 1421010035

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Riwayat Hidup	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	14
E. Fokus Penelitian	15
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	15
G. Signifikasi Penelitian	16
H. Metodologi Penelitian	16
 BAB II Poligami Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam	
A. Pengertian, Konsep Dan Dasar Hukum Poligami	20
1. Pengertian Poligami	20
2. Dasar Hukum Poligami	22
3. Syarat-syarat Poligami	29
4. Poligami Tanpa Izin	33
B. Sistem Pewarisan Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam	34
C. Tinjauan Pustaka	54
 BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN	
A. Profil Desa Way Urang Kabupaten Lampung Selatan.....	55
1. Identitas Kelurahan Way Urang	55
2. Batas Wilayah Kelurahan Way Urang	55
3. Orbitrasi Kelurahan Way Urang	56
4. Luas Wilayah dan Peruntukan Tanah Kelurahan Way Urang	56
5. Keadaan Penduduk Dan Jenis Kelami	57

6. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur	58
7. Keadaan Penduduk Menurut Agama	58
8. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	59
B. Pembagian Hak Waris Istri Dalam Kasus Poligami di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.....	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Pembagian Hak Waris Istri Kedua di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.....	64
B. Analisis Tentang Pembagian Hak Waris Istri Kedua Dilihat dari Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Riset dari Kesbangpol Provinsi Lampung
2. Surat Riset dari Kasbangpol Kabupaten
3. Surat Riset dari UIN Raden Intan Lampung
4. Pedoman Wawancara
5. Daftar Tabel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua** (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”. Untuk menghindari dari kesalah fahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dan mengartikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah seperti berikut:

1. Poligami Tanpa izin istri pertama

a. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau gamos yang artinya perkawinan. Jadi, poligami adalah perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addud al-zaujaat*. Adapun dalam ensiklopedi Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam suatu saat.

Poligami adalah Suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita ¹

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951

b. Tanpa izin istri pertama

Adalah pernikahan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan dan izin dari istri pertamanya. Dalam islam Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan diminta persetujuannya.

2. Implikasi Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua

Menurut Silalahi implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.²

3. Hak Waris Istri Kedua

Pembagian hak waris adalah hukum yg mengatur tentang pemindahan hak ke pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris,menentukan siapa-siapa yg menentukan ahli waris dan berapa bagianya masing-masing.³

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda *Erfrecht*. Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa Hukum Waris (*Erfrecht*) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁴

² Padma D.Liman,*Hukum Waris;Perwarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetbok (BW)* (Cet.1;Malang;Wineka Media,2011) h.58

³ Padma D. Liman, *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)* (Cet. 1; Malang: Wineka Media, 2011) h. 58

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Ed. 1 Cet. 2; Jakarta : Kencana, 2010) h. 255

Jadi yang dimaksud dengan hak waris istri kedua adalah seorang perempuan dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) apabila terikat oleh suatu ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris (suami)

4. Desa Way Urang

Adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas 1261 Ha, terdapat 10.025 jiwa, dengan jumlah penduduk islam sebesar 9719 jiwa, kristen 102 jiwa, katholik 97 jiwa, budha 87 jiwa, hindu 47 jiwa.

Alasannya karena lokasi tersebut dekat dengan peneliti dan di lokasi tersebut terjadi sebuah kasus yang diharapkan dengan judul peneliti.

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian yang mendalam mengenai Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama dan Akibatnya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan mengingat pada saat ini banyak masyarakat yang melangsungkan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua.

2. Secara Subjektif

- a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat, karena sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, tanpa bantuan orang lain atau harus adanya kontak diantara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan.

Dalam membangun masyarakat, Islam telah memberikan ketentuan hukum yang sangat jelas untuk kemashlahatan manusia, yang mana terangkum dalam *maqashid al-syariah*. Lebih jauh, Islam telah memberi perhatian yang besar dalam pembentukan keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil yang memiliki kontribusi besar dalam membangun masyarakat.

Maka tidak heran jika di dalam Al-Qur'an dan Hadits banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan masalah perkawinan dan keluarga.

Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan perkawinan selalu saja ada permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, tetapi yang paling populer di antaranya yaitu monogami dan poligami. Dari kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan sebaliknya (Pasal 27 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan) dan juga KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menganut asas monogami mutlak. Walaupun

perkawinan monogami merupakan perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya *public figur* yang melakukan poligami. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa Ayat 3).

Permasalahan dalam perkawinan yang semakin berkembang, menuntut para Ulama salaf maupun kontemporer untuk menuangkan buah pikirannya guna menjawab masalah yang semakin kompleks, dan pada gilirannya menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Hal ini sangat wajar, mengingat masalah perkawinan merupakan salah satu cabang mu'amalah yang terus bergerak dinamis dan menuntut jawaban dengan segera. Salah satu permasalahan dalam perkawinan yang hingga saat ini belum selesai diperdebatkan dan menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para Ulama maupun Akademisi ialah masalah poligami.⁵

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), h. 6

Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, maupun psikologis. Bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan, karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena slingkuh dan prostitusi.

Ketentuan mengenai masalah poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Walaupun sudah ada Undang-undang Perkawinan tersebut, kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Praktek poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggungjawab pada satu keluarga saja maka setelah ia berpoligami ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri dan anak-anaknya.

Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari tindakan perkawinan poligami tersebut ialah apakah perkawinan yang dilakukan oleh suami tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melakukan perkawinan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang tentang perkawinan yang dapat menimbulkan perkawinan tentang

perkawinan yang dapat menimbulkan pertanyaan apakah sah atau tidaknya dimata hukum lalu apabila sang suami telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yaitu harta warisan yang harus dengan segera agar dibagikan kepada ahli waris, bagaimana hak waris atas harta tersebut.

Adapun kasus praktik poligami tanpa persetujuan isteri pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA), melalui putusan No. 2039 K/Pdt/1999, dalam putusanya itu MA menetapkan pembatalan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo dan Widi Astuti. Majelis kasasi MA yang diketuai M. Yahya Harahap memutuskan perkawinan Mukalo – Widi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alhasil, perkawinan Mukalo-Widi itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Selain dari itu, poligami merupakan masalah yang paling banyak diberlakukan sanksi hukum oleh hukum keluarga di negara-negara Muslim modern. Setidaknya terdapat lima belas negara Muslim yang telah mempersulit dan memberlakukan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam hukum keluarga mereka. Dari kelima belas negara tersebut, Tunisia merupakan negara yang paling keras melarang poligami, dengan menetapkan sanksi penjara atau denda terhadap pelakunya.

Sampai saat ini memang Undang-Undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang menikah lagi tanpa seizin Pengadilan Agama (PA). Adapun rencana pemberlakuan sanksi hukum

terhadap pelaku poligami tanpa izin PA dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, hingga saat ini belum diputuskan. Aturan yang sudah ada hanyalah mengatur tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu sebagaimana yang telah diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum Islam mengenal perkawinan poligami (mempunyai istri lebih dari satu), di dalamnya diatur pula mengenai hak waris istri dari perkawinan poligami yakni istri dari perkawinan poligami mendapat bagian yang sama besar seperti halnya bagian yang diterima oleh istri terlebih dahulu. Tetapi dalam kenyataannya hak waris istri dari perkawinan poligami tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ia dapatkan. Sedangkan Hukum Perdata tidak mengenal perkawinan poligami tetapi yang ada adalah perkawinan yang ke dua dan selanjutnya setelah terjadinya kematian atau perceraian dengan istri terdahulu dan diatur pula mengenai hak warisnya.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 221, perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil¹¹. Perkawinan putus karena kematian artinya kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus.

Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusnya perkawinan karena kematian. Yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja, tetapi putusnya perkawinan karena kematian secara otomatis mengakibatkan terjadinya pewarisan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris.⁶ Secara garis besar, *BW* membedakan ahli waris atas 2, yaitu ahli waris *ab intestato* dan ahli waris *testamenter*. Ahli waris *ab intestato* ini adalah ahli waris menurut atau berdasarkan Undang-undang dan mereka secara otomatis menjadi ahli waris jika terjadi kematian. Sedangkan apabila ada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pewaris agar juga memiliki harta peninggalannya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pewaris maka kehendak ini dapat dituangkan dalam suatu akta yang disebut wasiat. Ahli waris yang ditentukan dalam wasiat tersebut adalah ahli waris *testamenter*.⁷

Bahwa dalam pembagian harta warisan itu menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata, yang lebih diutamakan adalah orang yang mempunyai hubungan darah (nasab) dengan pewaris sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Surat An-

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. Revisi; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) h. 194

⁷ Padma D. Liman, *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)* (Cet. 1; Malang: Wineka Media, 2011) h. 12-13

Nisa (4) ayat 7, maka istri dan anak-anaknya sangatlah berperan dalam pembagian harta warisan. Dan pembagian warisan antara kedua hukum yaitu Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata berbeda karena adanya perbedaan asas yang dipakai. Pembagian warisan untuk menikah lebih dari satu kali sering menimbulkan masalah yaitu bagaimana hak waris dari istri atas perkawinan poligami tersebut.

Dalam Perkawinan terdahulu, akan diperoleh harta perkawinan yang terdiri dari harta bawaan dan harta bersama, dimana harta perkawinan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup selama perkawinan dan akan menjadi warisan bagi ahli waris dikemudian hari, berbicara tentang warisan artinya peneliti mengarahkan perhatian para pembaca kepada suatu peristiwa hukum yaitu peristiwa kematian.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya kematian seseorang diantaranya ialah penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang. Peristiwa kematian ini juga membawa konsekuensi yuridis berupa hubungan saling mewarisi antara si pewaris dengan ahli waris, yang diatur dalam Hukum Waris.

Hak waris istri dari perkawinan poligami dalam Hukum Islam, di sebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ۙ وَ ۙ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ۙ وَ ۙ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۙ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ ۙ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

وَالَّذِينَ تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ ۖ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ ۖ كَلًا أَوْ امْرَأَةً ۖ وَآخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa : 12)

Perdata Barat, dan Hukum Islam, sedangkan pada masyarakat adat di Indonesia pada umumnya berpedoman pada hukum waris adat yang berdasarkan sistem kekerabatan. Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam mewarisi yaitu: adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan karena adanya hubungan kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan lain-lain. Di dalam Hukum Kewarisan Islam, duda dan janda dikatakan sebagai ahli waris *sababiyah*, artinya kedudukan mereka sebagai salah satu ahli waris lahir karena peristiwa hukum tertentu, yaitu perkawinan. Sementara

anak, bapak, ibu, saudara dan lain-lain dikatakan sebagai salah satu waris *nasabiyah*, artinya kedudukan mereka sebagai ahli waris muncul karena kelahiran. Secara umum dapat dikatakan sebagai ahli waris *nasabiyah* lebih kuat dari pada ahli waris *sababiyah* sebab hubungan darah atau nasab tidak dapat terputus karena alasan apapun, sementara itu hubungan perkawinan dapat terputus yakni jika terjadi perceraian. Suatu perkawinan yang sah menimbulkan hak waris kepada seseorang dalam hal ada yang meninggal. Berkaitan dengan ahli waris dari pewaris (suami) yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri pertama dan Pengadilan Agama, karena ketentuan hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai ini masih belum merupakan unifikasi hukum sehingga di dalam pengaturannya berpedoman pada aturan hukum yang berbeda-beda yang menimbulkan suatu permasalahan yang menyangkut kewarisan dari istri dari perkawinan kedua.

Menurut Hukum Perdata bahwa dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya, berlakulah demi hukum persatuan harta kekayaan secara bulat antara suami dan istri kedua atau selanjutnya selama dalam perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain sesuai dalam Pasal 180 KUH Perdata. Namun apakah pada kenyataan telah sesuai dengan teori dan aturan yang ada, dengan terciptanya suatu ketertiban dan keadilan yang sangat dibutuhkan bahwa para pelaku poligami tersebut.

Di Desa Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan terdapat suatu permasalahan dalam hak pembagian harta waris antara istri pertama dan istri ke dua (poligami). Terdapat sengketa mengenai harta

warisan pada kasus Almarhum Tony Chandra pernah menikahi Tergugat sebagai istri keduanya tanpa seizin dari Penggugat selaku istri pertamanya yang sah. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah hak mewaris Tergugat.

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai poligami khususnya pada Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan maka penulis tertarik dalam membahas skripsi yang berjudul POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ISTRI KEDUA (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri kedua?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri kedua?

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimana pembagian hak waris istri kedua terhadap poligami tanpa izin istri pertama”.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Pembagian Hak Waris Istri Kedua di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
- b. Untuk mengetahui bagaimana fenomena itu dilihat dari perpektif hukum Islam dan hukum positif

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memperkaya bahan-bahan yang bersifat teoritis, khususnya dalam bidang Hukum Waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dan pada umumnya bidang ilmu hukum itu sendiri.
- 2) Memberikan referensi untuk kepentingan kepustakaan maupun kepentingan lain yang bersifat akademis.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai penetapan hak waris bagi istri kedua sebagai ahli waris poligami.

G. Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk mengembangkan ilmu hukum, yaitu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya.

2. Manfaat Praktis:

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan titik terang atau pemahaman tentang akibat poligami tanpa izin terhadap pewarisan.

H. Metode Penelitian.

Metode penelitian dalam skripsi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan). Selain itu digunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari data pustaka seperti, al-Qur'an, Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, Fiqh Munakahat, KHI, dan hukum perkawinan adat yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif⁸

⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, , 1996), h. 81

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.⁹

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui interview dengan tokoh agama.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode

- a. Wawancara, adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber.

⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106

¹⁰*Ibid*, h. 106

¹¹ *Ibid*, h. 107

Adapun hal-hal yang disiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.¹²

Dalam skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan sebanyak 23 orang yang berada pada Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari tokoh masyarakat sebanyak 6 orang, tokoh agama 4 orang, aparatur desa 5 orang, dari ke 2 pihak keluarga 6 orang, dan saksi sebanyak 2 orang,

b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interviem, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.¹³

4. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁴

Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan termasuk budayanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 171

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 26

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1999, h.206.

penulis juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

D. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.¹⁵ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁶ Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (*Sosio antropologi*) poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. b) Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.¹⁷ Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam

¹⁵ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 11

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008, h. 1089

¹⁷ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h. 71-72

waktu bersamaan.¹⁸ Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.¹⁹ Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataan nya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.

2. Dasar Hukum Poligami

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah poligami termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan, yaitu dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Untuk PNS, terdapat dalam PP RI No. 10 Th. 1983 yang telah disempurnakan dengan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Inpres No.1 Th. 1991 tentang KHI.²⁰

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Namun demikian, salah satu prinsip atau asas perkawinan yaitu asas monogami yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 juncto penjelasan umum bagian 4 huruf (c) UU No.1 Th. 1974.

Menurut Soemiyati, asas monogami dalam UU perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan menetapkan persyaratan-persyaratan dan

¹⁸ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

¹⁹ Supardi Mursalim , *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), h. 47.

prosedur yang telah ditentukan dalam UU perkawinan. Persyaratan dan prosedur poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974, yaitu PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat lain diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Mengenai masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yaitu, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau *madharat* dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Menurut Rasyid Ridho maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.²¹

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.

Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syaratsyarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan

²¹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gria karya, cet-1, 1988), h. 12

tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.²²

Sabda Rasulullah SAW :

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka". (HR. Tirmidzi).²³

Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

²² Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

²³ Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h.. 1047 19

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan perempuan lain yang disenangi.²⁵ Begitu juga dengan Surat An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ”

Adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, Cetakan Kesepuluh* (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77 20

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*(Jakarta:PT Raja Gravindo Persada,2013),h.357

memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendak nya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.²⁶

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahirian bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Sebab, Allah Swt. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن
تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan nya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Hukum perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan dan bukan wajib. Akan tetapi kebolehan berpoligami itu sekiranya telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan, di antara syarat tersebut adalah

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

- a. Mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak.
- b. Berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan, maka ia tidak dibenarkan untuk berpoligami.²⁷

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada surah An-Nisaa' ayat 3 seperti mana yang difahami bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk berpoligami, hanya saja menunjukkan kebolehan saja. Bagi yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakannya, maka dirinya tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Kebiasaannya sistem poligami tidak akan kecuali dalam kondisi mendesak saja.²⁸ Dari uraian ringkas di atas dapat diketahui bahwa hukum poligami adalah mubah (boleh) bukanlah sunat dan bukan pula wajib. Artinya kondisi yang bagaimana menuntut adanya poligami seperti mandulnya seorang istri, istri yang sakit tidak bisa melayani kebutuhan suami, dan meningkatnya jumlah kaum perempuan, maka dalam kondisi yang seperti inilah Islam memberikan solusi untuk melakukan poligami dengan mensyaratkan dengan adanya keadilan dalam mengatur urusan- urusan bahtera rumah tangga yang bahagia.

3. Syarat-syarat Poligami

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain itu syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang *Perkawinan* yang juga harus dipenuhi, adalah:

²⁷ Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapura : Dakwah Printing, 1990), Cet. Pertama, h. 31

²⁸ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (tt, 2005), Cet. ke-2, h..

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²⁹

Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan komulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.³⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998), h. 172

³⁰ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 164

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Undang –undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat tentang kebolehan poligami dengan persyaratan tertentu salah satunya adalah adil. dalam perpektif psikologis, adanya kebolehan poligami dengan persyaratan adil mempunyai dampak psikis begitu besar.³¹

Dalam Al- Qur'an menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

- a. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.

Dalilnya adalah firman Allah swt. Surat An-Nisa': 3,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً^ص

artinya “Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.

- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

³¹ Jurnal AL-Adalah”, Vol.12, No 2 Tahun 2015 (Bandar Lampung): Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung,2015.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

Allah berfirman, “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”

- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW. Bersabda:

“Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah.” (Muttafaq ‘alaih)

- d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada mereka.

Allah SWT. Berfirman,”

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-Nya, sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya.”
(An-Nur:33)

4. Poligami Tanpa Izin Istri Pertama

Hingga saat ini poligami di Indonesia masih menjadi topik yang laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang maraknya prakter poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan yang kontraproduktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.

Akan tetapi adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan sebagainya. Demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak sertamerta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan diminta persetujuannya dan tidak ada kabar istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, apabila istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding/kasasi.

Syari'at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil bagi kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi maupun dengan yang rendah. Bila suami khawatir berbuat yang tidak baik dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.

E. Sistem Pewarisan Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

1. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata

Hukum adalah suatu yang berkenaan dengan manusia, yaitu aturan yang mengatur manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Menjadi suatu pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum Perdata Barat bahwa setiap manusia itu merupakan orang pembawa hak. Sebagai pembawa hak padanya dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, menerima hibah mutlak dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban.³²

³² Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung, Pionir Jaya, 1992), h. 1.

Hukum di Indonesia masih bersifat Pluralistis yaitu berlakunya banyak sistem hukum didalam suatu wilayah tertentu yang mengatur masalah yang berlaku bagi masing-masing golongan. Seperti halnya hukum yang mengatur masalah waris yaitu masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata Barat dan Waris Islam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum Keluarga. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Untuk itu hingga kini peraturan masalah waris masih belum terdapat keseragaman. Apabila memperhatikan pengaturan yang berbeda-beda, maka dapat diketahui baik perbedaan maupun persamaannya dan selanjutnya akan dapat diketahui baik perbedaan maupun persamaannya dan para ahli waris, baik menurut Hukum Waris Perdata Barat maupun Hukum Waris Islam.³³

Sebagai akibat dari keadaan yang ditemukan tersebut, maka Hukum Waris yang berlaku di Indonesia pada “Hukum Waris yang berlaku bagi yang meninggal dunia”. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa/Timur Asing Cina, maka bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat. Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan Hukum Waris Islam.³⁴

Menurut Soepomo Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedren*) dari angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, dalam definisi warisan ini mempunyai 3 unsur yaitu:

³³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung Amrico 1985), h. 18

³⁴ Retno Wulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1979), h. 84.

- a. Seseorang peninggal warisan (*elflater*) yang pada saat meninggal dunia meninggalkan kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan (*nalatenchap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.³⁵

Hukum Perdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUH Perdata menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta warisan (peninggalan) dapat dibagi-bagi pemiliknya antara para ahli waris.³⁶

Ciri khas hukum waris menurut KUH Perdata antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menurut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menurut pembagian harta warisan di depan Pengadilan. Tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dipaksa untuk memberikan harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;

³⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, h.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 269

- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- d. Perjanjian penangguhan pembagian harta berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.³⁷

Undang-undang merupakan dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia dan tidak ditarik kembali selama pembuat surat wasiat masih hidup. Surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut seakan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak lagi dapat diubah, dicabut maupun ditarik kembali oleh siapapun. Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris. Berdasarkan undang-undang (ahli waris *Ab intestate*). Hal ini tidak berarti bahwa ahli waris karena wasiat merupakan penghalang bagi ahli waris *Ab intesto*.

Untuk menentukan besarnya *Legitime portie* (bagian waris menurut undang-undang yang tidak boleh dikurangi oleh pewaris) dalam suatu warisan pada Pasal 921 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggal dunia ditetapkan jumlahnya, berdasarkan harga pada waktu pewaris meninggal.
- b. Jumlah itu harus ditambah dengan barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup.
- c. Jumlah yang terdapat tersebut dikurangi dengan segala hutang pewaris.
- d. Sisa pengurangan ini dijadikan dasar menghitung *legitime portie* para ahli waris mutlak.

³⁷ Ibid, h.270

Ahli waris menurut Hukum Perdata adalah sekalian orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Kepemilikan suatu benda terjadi diantaranya dengan adanya pewarisan dari orang yang meninggal dunia karena disebabkan adanya suatu ikatan menurut undang-undang maupun karena wasiat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “hak milik atas segala sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penterahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebasterhadap kebendaan itu” Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 913. KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Legitime portie (bagian mutlak), adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Bagian mutlak bagi para waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam Pasal 914 KUH Perdata yaitu:

- a. Kalau hanya ada seseorang anak (Sah) saja, maka bagian itu adalah setengah dari bagian itu jika ia mewariskan tanpa testament;
- b. Kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar $\frac{2}{3}$ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen;
- c. Kalau ada 3 anak atau lebih maka bagian itu tiga per empat bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen;
- d. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya.

Berhubungan dengan ahli waris menurut Hukum Perdata untuk dapat menjadi ahli waris ditentukan dengan 2 cara yaitu :³⁸

a. Ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang (*Ab intestate*)

Ahli waris menurut ketentuan undang-undang ini dibagi dalam 4 golongan yaitu :

- 1) golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami/istri yang ditinggalkan / yang hidup paling lama (Pasal 852 KUH Perdata)
- 2) golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara (Pasal 854 KUH Perdata, Pasal 855 KUH Perdata, Pasal 856 KUH Perdata, Pasal 844 KUH Perdata, dan Pasal 857 KUH Perdata)
- 3) golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris (Pasal 853 ayat(1) KUH Perdata. Dan Pasal 858 ayat (1) KUH Perdata)
- 4) golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam(Pasal 858 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 861 ayat (1) KUH Perdata)

b. Pewarisan menurut wasiat (*testament*)

Pewarisan menurut wasiat terjadi apabila pewaris menunjuk orang untuk menjadi ahli waris. Pengertian suatu wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah mati. Wasiat merupakan suatu penunjukan yang sifatnya sepihak artinya keluar dari seorang (pewaris) saja, selain itu kedudukannya tidak tetap yaitu sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Surat wasiat

³⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Armico, 1985), h. 29

tidak boleh bertentangan dengan hukum. Isi urat wasiat tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 957 KUH Perdata, yaitu :

- 1) wasiat yang menunjukan berupa tertentu (*Leggat*)
- 2) wasiat yang menunjuk berupa bagian dari pada warisan (*erftelling*)

Seorang yang mendapat *erftelling* mempunyai kedudukan sebagai ahli waris undang-undang sehingga akibatnya ia tidak hanya menerima hak-hak yang melekat pada harta warisan, melainkan juga kewajiban-kewajiban antara lain membayar hutang-hutang dari pewaris.

Berbeda dengan seorang yang mendapat *leggat*, ia tidak mempunyai kedudukan sebagai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang sehingga ia tidak dapat menggantikan pewaris dari hak-hak dan kewajiban yaitu untuk membayar hutang-hutang pewaris. Selain itu dalam masalah barang ia hanya berhak menuntut penyerahan barang-barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris. Seorang legitaris berkedudukan sebagai penerima beberapa benda itu kepada orang lain yang ditunjuk dalam wasiat (*testament*). Ahli waris menurut wasiat harus ada sewaktu pewaris meninggal dunia. Ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak menerima warisan karena ada beberapa penyebab diantaranya adalah yang disebutkan dalam Pasal 838 KUH Perdata ayat (1) sampai (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si meninggal ;
- 2) mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan tekah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya/ hukuman yang lebih berat;

- 3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4) mereka yang telah menggelapkan, merusak / memalsukan surat wasiat si yang meninggal.³⁹

2. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Islam

Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya telah dimulai untuk menjalankan Sabda Rasulullah SAW untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris, sebagaimana Sabda Nabi :

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraidh dan ajarilah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedangkan ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang menemukannya yang memberitahukannya kepada keduanya.: (H.R.Ahmad).

Dari hadist diatas tersirat bahwa mempelajari ilmu Faraidh (ilmu waris) adalah sesuatu keharusan bagi umat Islam agar dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sekarang, bagaimana penerapan ilmu tersebut (Hukum Waris Islam) dalam kehidupan lingkungan masyarakat muslim Indonesia secara konsisten, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas Hukum Waris Islam tersebut telah disyaratkan dalam Al-Qur’an maupun Sunnah bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Apalagi peran Pengadilan Agama yang telah disahkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu sebagai Pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Huzairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran mengemukakan bahwa “sistem kewarisan islam adalah sistem individual bilateral.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 223

Hal ini tersebut berdasarkan kepada ayat-ayat tentang kewarisan dalam Al-Quran antara lain tercantum dalam ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 Q.S An.Nisa, setelah sistem waris menurut Al-Quran yang individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral.

Pengertian waris menurut bahasa arab merupakan *mashbar* dari *warits* yang berarti menjatuhkan dan warisan yang berarti pengalihan (peninggalan) lebih jelas lagi Al Munawir Ahmad Warson dalam kamus Arab mengemukakan bahwa warisan itu adalah memindahkan sesuatu kepadanya atas seseorang setelah meninggal, adapun pengertian hukum kewarisan berdasarkan Pasal 171 KHI yang menyatakan bahwa: “hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hakpemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhakmenjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁴⁰

Dalam Islam sebab-sebab pusaka ada 4 yaitu:

- a. Kekeluargaan;
- b. Perkawinan;
- c. Dengan jalan memerdekakan dari perbudakan;
- d. Hubungan Islam, orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya diserahkan keBaitul untuk umat Islam dengan jalan pusaka.⁴¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pewarisan, yaitu:

- a. *Muwarits* yaitu orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya berha kdimiliki oleh ahli warisnya, baik dia mati secara *haqiqy*, *huqmy*, maupun *taqdiry*. Mati *huqmy* disimi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walupun sesungguhnya belum mati sejati/sebenarnya. Dalam

⁴⁰ A. Hamzah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), h. 70

⁴¹ Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung, Pionir Jaya, 1992), h.85.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang menerapkan tentang hak ahli waris dalam menerima harta warisan, yaitu: “barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”.

- b. *Warits* yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Baik itu disebabkan karena adanya hubungan (nasab) darah, kerabat, perikatan ataupun karena adanya hak perwalian dengan lain sebagainya.
- c. *Mauruts* yaitu harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Baik itu berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, itu pun setelah dipisahkan dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dahulu sehubungan dengan adanya peristiwa kematian. *Mauruts* (warisan) terapan sekali disebut orang dengan nama “*irtsan*, *miratsan* dan *tirkatan* (*tirkah*)”. Namun hakikatnya bermakna sama, yaitu seluruh harta benda dan kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum untuk para ahli warisnya.

Harta warisan atau maurutsun menurut ajaran Islam diartikan sama dengan harta peninggalan atau *tirkah*. *Tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dibenarkan oleh syarat untuk dipusakai oleh para ahli waris.⁴²

- a. Jumhur Ulama, *tirkah* itu adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik merupakan harta maupun merupakan

⁴² Muhamad Ali As-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. (Bandung, CV. Diponegoro, 1995), h. 47-48.

hak yang bersifat harta/hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya.

b. Dikatakan Fuqaha Hanafiyah terdapat tiga pendapat

- 1) Pendapat yang termashur dari Fuqaha Hanafiyah menafsirkan *tirkah* ialah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. *Tirkah* ini dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, hak pelunasan hutang, hak dan ahli waris.
- 2) Sebagian Fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa *tirkah* itu adalah sisa harta setelah diambil perawatan, hak pelunasan utang. Jadi *tirkah* dalam *ta'fi* ini ialah harta peninggalan yang harus dibayar untuk melaksanakan wasiat yang harus diterimakan kepada ahli waris.
- 3) Sebagian mereka yang lain, mengartikan secara mutlak yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mati, dengan demikian *tirkah* itu mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada ahli waris.⁴³

c. Ibnu Hamz sependapat dengan pendapat Fuqaha Hanafiyah yang mengatakan bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda saja. Sedangkan berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada

⁴³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1995), hlm 114

bendanya seperti hak mendirikan bangunan, atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.⁴⁴

- d. Ulama-ulama Malikiyah Syafi'iyah, Hanabilah memutlakkan *tirkah* kepada segala yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda, maupun hak-haknya. Baik hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Maliki saja yang memasukan hak-hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak beliau menjadi wali nikah, ke dalam keumumam arti anak-anak.
- e. Kitab undang-undang waris Mesir mengambil pendapat jumlah dalam menetapkan pengertian *tirkah* segala apa yang ditinggalkan oleh si mati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan hutang, sisa yang diwasiatkan yang diterima kepada ahli waris.

Dari berbagai warisan atau harta peninggalan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa warisan ialah berbagai perpindahan dan kewajiban tentang kekayaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris Menurut Hukum Islam

⁴⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 10

Pewaris adalah orang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁴⁵ Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta benda Al-Quran, yaitu :

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam Q.S An-Nisaa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 176.
- b. Hubungan semenda atau pernikahan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si pewaris dan (yang meninggal) dengan seseorang. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami dan istri dari yang meninggal. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang hak waris seorang istri. Menurut uraian di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) apabila terikat oleh suatu ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris (suami). Disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 12, yang artinya : “... para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jikakamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudahdipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”
- c. hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris. Seperti tersurat Q.S Al-Azhab ayat 6 : “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin

⁴⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), h. 16

dibandingkan diri merekasendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orangmuhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah)”

- d. hubungan kerabat Karena sama-sama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah. Seperti tersurat dalam Q.S Al -Anfaal ayat 75: “Dan orang yang beriman setelah itu berhijrah dan berjihad bersamamumaka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

4. Hak Ahli Waris Dalam Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu;

1. *Dzul Farā'idh*

Ahli waris ini terdiri dari semua orang yang mendapat bagian tertentu secara pasti dan tetap menurut Al-Qur'an. Bagian-bagian ini adalah. Dalam pembagian pokok ini tak *menghijab* dan tak *dihijab*. *Hijāb* ialah sistem keutamaan yang menentukan siapa yang berhak menyingkirkan orang lain yang ikut serta mewaris. Bagian *Dzul farā'id* diambil dari sisa harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang. Zakat, wasiat, dan ongkos-ongkos untuk jenazah. Jika jumlah *farā'id* melampaui sisa besar maka diadakan “*awl*” atau pengurangan. Ahli waris *dzul farā'idh* ini di

dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nissa ayat 11, 12 dan 176. Bahwa jumlah ahli waris berdasarkan Al-Qur'an terdiri dari dua belas, yaitu :

- a. Dalam garis ke bawah
 - 1) Anak Perempuan
 - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S An-Nisa ayat 11)
- b. Dalam garis ke atas
 - 1) Ayah
 - 2) Ibu
 - 3) Kakek dari garis ayah
 - 4) Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S An-nisa ayat 11)
- c. Dalam garis kesamping
 - 1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
 - 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah (Q.S An-Nisa ayat 12)
 - 3) Saudara lelaki tiri dari garis ibu (Q.S An-Nisa ayat 12)
- d. Duda dan Janda (Q.S An-Nisa ayat 12)

2. *Ashābah*

Ashābah dalam bahasa Arab berarti “anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak ayah”. *Ashābah* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa ahli waris *ashābah* terdiri dari

- a. *Ashābah Binafsih* yaitu *ashābah-ashābah* yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa, yang urutannya yaitu:
 - 1) Anak laki-laki.
 - 2) Cucu laki-laki terus kebawah asal saja pertaliannya masih laki-laki.
 - 3) Ayah .

- 4) Kakek dari pihak ayah dan terus asala saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah.
 - 5) Saudara laki-laki sekandung.
 - 6) Saudara laki-laki seayah.
 - 7) Anak saudara laki-laki kandung.
 - 8) Anak saudara laki-laki seayah.
 - 9) Paman yang sekandung dengan ayah.
 - 10) Paman yang seayah dengan ayah.
 - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
 - 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- b. *Ashābah Bilghairi* yaitu *ashābah* yang sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashābah* karena ditarik oleh seorang laki-laki. Mereka yang termasuk *ashābah bilghairi* adalah sebagai berikut:
- 1) Anak perempuan yang disamping oleh anak laki-laki.
 - 2) Saudara perempuan yang disamping oleh saudara laki-laki.
- c. *Ashābah Ma'al Ghairi* yaitu perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris, mereka ini adalah:
- 1) Saudara perempuan sekandung.
 - 2) Saudara perempuan seayah.

3. *Dzul Arham*

Artinya kata *Dzul Arham* adalah “orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja”. Arti sebenarnya dari *dzul arhām* ialah setiap orang yang ada hubungan darah dengan pewaris bukan *dzul farāidh* dan bukan *ashābah*. *Dzul arhām* ini bukan manerima warisan bilamana tidak

ada kedua golongan ahli waris tersebut diatas. *Dzul arhām* ini terdiri dari 11 orang yaitu.

- a. Cucu laki-laki keturunan anak perempuan
- b. Kemenakan laki-laki yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan
- c. Anak perempuan dari saudaran laki-laki
- d. Anak perempuan dari paman
- e. Paman dari ibu
- f. Saudara laki-laki dari ibu
- g. Saudara perempuan dari ayah
- h. Ayah dan ibu
- i. Ibu dari ayah
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh M. Nazar, mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, tahun 2016 dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Siri Online: Kajian tentang Tata Cara Pelaksanaannya". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu praktik nikah siri online dilakukan dengan menggunakan media skype yang dapat melihat secara langsung wajah penghulu dan kedua mempelai. Akibat yang akan muncul adalah ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak

yang melakukannya, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak dapat menuntut hak-haknya bila terjadi konflik dalam rumah tangga

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Anisahuri, mahasiswi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul: "Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat: Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan nomatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak dicatat diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (*mudharat*) di dalamnya, namun hukumnya sah. Dalil yang dirujuk MUI yaitu Alquran dan hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk menaati pemerintah (*ulil amri*). Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah.

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Profil Desa Way Urang Kabupaten Lampung Selatan

1. Identitas Kelurahan Way Urang

Penelitian ini dilakukan di

Desa Way urang, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

2. Batas Wilayah Kelurahan Way Urang

Batas-batas wilayah Kelurahan Way Urang sebagai berikut:

Tabel 1 Batas Wilayah

No	Bagian	Berbatasan dengan
1	Timur	Desa Kedaton
2	Barat	Desa Canti
3	Selatan	Palembapang
4	Utara	Merak Belantung

(Sumber : Monografi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019)

3. Orbitasi Kelurahan Way Urang

Orbitasi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menuju Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Propinsi adalah sebagai berikut :

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 1,5 km

2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 1 km

3. Jarak ke Ibu Kota Propinsi : 63 km

(Sumber : Monografi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010)

4. Luas Wilayah dan Peruntukan Tanah

Luas Kelurahan Way Urang adalah 1.216 Ha, dengan peruntukan tanah sebagai berikut:

Tabel 2 Peruntukan Tanah Kelurahan Way Urang

No	Peruntukan Tanah	Luas Wilayah
1	Pemukiman/Perumahan	850
2	Persawahan	8

3	Perkebunan	231
4	Pekarangan	139
5	Sarana Umum	3
Jumlah		1.231

Sumber : Monografi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa peruntukan tanah di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan paling luas yaitu 850 Ha adalah pemukiman/perumahan penduduk sedangkan yang peruntukan tanah paling sedikit yaitu 3 Ha adalah untuk sarana umum.

5. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Keadaan penduduk Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-Laki	4.247
2	Perempuan	5.805
Jumlah		10.025

Sumber : Monografi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa jumlah penduduk Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda adalah 10.025 jiwa, terdiri dari 4.247 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 5.805 penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian maka penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki.



6. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

Keadaan penduduk Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0 – 12 bulan	587
2	13 bulan – 4 tahun	1.100

3	5 tahun - 75 tahun	8.365
Jumlah		10.025

Sumber : Monografi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa sebanyak 587 penduduk di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda berusia antara 0-12 bulan, sebanyak 1.100 penduduk berusia antara 13 bulan - 4 tahun dan sebanyak 8.365 penduduk berusia antara 5 – 75 tahun. Dengan demikian maka sebagian besar penduduk berusia antara 5 – 75 tahun.

7. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Keadaan penduduk Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda dilihat dari penganut Agama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Keadaan Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	9719
2	Kristen	102
3	Katholik	97
4	Budha	87
5	Hindu	47
Jumlah		10.025

Sumber : Monografi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penganut agama mayoritas di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda adalah Islam yaitu 9.719 jiwa, sedangkan penganut mayoritas adalah Hindu yaitu 47 jiwa. Data di atas menunjukkan bahwa penganut agama Kelurahan Way Urang beragam, yang menunjukkan adanya toleransi antar penganut agama di Kelurahan ini.

8. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda menurut tingkat Pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	1.115
2	Taman Kanak Kanak	287
3	Sekolah Dasar	3272
4	SMP/SLTP	2458
5	SMA/SLTA	3486
6	Akademi/D1-D3	486
7	Sarjana (S1-S3)	35
Jumlah		10.025

Sumber : Monografi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda

Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Way Urang berdasarkan tingkat pendidikan adalah penduduk yang berada pada pendidikan Sekolah Dasar dengan jumlah 3272. Kelompok tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah penduduk yang

berada pada kelompok tingkat pendidikan saerjana (S1-S3) dengan jumlah 35 orang.

B. Pembagian Hak Waris Istri Dalam Kasus Poligami di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Poligami yang terjadi di desa Wayurang ini sudah terjadi beberapa kali, tidak saja pada sdr.Tony Candra, akan tetapi ada beberapa orang melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masarakat dikatakan bahwa poligami yang terjadi atas kehendak mereka sendiri dan pengaruh dari teman-teman mereka serta dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, Dalam pembagian harta waris mereka yang melakukan poligami mereka tidak mengetahui sama sekali ilmu tentang pembagian hak waris karna kebanyakan bukan termasuk orang yang banyak belajar tentang ilmu tersebut.

Dalam ayat Al- Qur'an juga menerangkan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

- a. Mampu berbuat adil kepada semua istrinya.
- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak Meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.
- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka.
- d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada mereka.

Adapun kasus poligami yang penulis teliti adalah kasus antara Tony Candra dengan istri-istrinya, adapun kronologi kasusnya sebagai berikut. Tony Candra menikah dengan istri pertama bernama Zuliyati pada tahun 1994 di desa Sukajadi. Perkawinan itu dilakukan secara resmi dan memperoleh buku catatan nikah dari KUA setempat. Sayangnya setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, pasangan tersebut belum juga dikaruniai keturunan, Oleh karena itu Tony Candra berniat ingin menikah lagi. Niat ini disampaikan pada istrinya (Zuliyati), namun tidak diijinkan Akhirnya Tony Candra memutuskan perkawinan secara diam-diam (sirri) tanpa ijin istri pertama.⁴⁶

Perkawinan kedua ini dilangsungkan di desa Way Urang kecamatan Kalianda pada tahun 2014 dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Pujiastuti. Perkawinan ini dilangsungkan secara sirri (diam-diam) Pernikahan ini hanya diketahui beberapa orang saja dalam arti tidak dicatatkan atau dilaporkan secara resmi di KUA kecamatan Kalianda, Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh Romzi dan Muawanah (orang tua dari mempelai wanita), Bapak Sulaiman dan Ahmad Syaiful (sebagai saksi) dan beberapa teman serta kerabatnya.

Pada pernikahan dengan istri pertama Tony Candra menikah pada tahun 1994 dan Tony Candra memiliki usaha rumah makan namun pernah mengalami kebangkrutan setelah itu Tony Candra membuka usaha kembali dengan modal pinjaman dari pihak Bank untuk membuka toko pakaian yang terletak di Desa

⁴⁶ Ahmad Jazuli, Tokoh Agama Desa Wayurang, Wawancara Tanggal 26 Juli 2019

Way Urang, dari pernikahan Tony Candra dan istri pertama memperoleh sebidang tanah perkarangan seluas 420 m², dan memiliki toko pakaian (sewa). sedangkan dengan istri kedua usaha yang dijalani Tony Candra mengalami kemajuan yang cukup bagus sehingga mampu memperoleh rumah seluas 12x 10 M, yang ada di Desa Way Urang kecamatan Kalianda atas nama Tony Candra dan 2 unit kendaraan bermotor (Honda Supra x 125 dan Honda Beat).

Dari perkawinan ini Tony Candra memperoleh seorang anak laki-laki. Setelah perkawinan ini, Tony harus bolak balik menginap di desa Sukajadi ke Desa Way Urang. Setelah pernikahan kedua terjadi Selama 5 tahun, Tony Candra meninggal, namun sebelum ia meninggal Tony Chanda telah membuat surat wasiat yang isinya: sebidang tanah perkarangan seluas 420 m² SHM No.4682 (harta dengan istri pertama) Desa Way Urang kecamatan Kalianda jalan (Sukarno Hatta), dan toko pakaian yang diberikan kepada istri yang pertama, rumah seluas 12x 10 m, yang ada di Desa Way Urang kecamatan Kalianda atas nama Tony Candra dan 2 unit kendaraan bermotor (Honda Supra x 125 dan Honda Beat) diberikan kepada istri yang kedua.⁴⁷

Surat wasiat itu dititipkan kepada Ahmat Jazuli, selaku tokoh Agama dan dibaca pada hari ke-3 setelah Tony Candra meninggal. Pada saat surat itu dibuka yang menjadi saksi Romzi, Zuliati, Muawanah, dan Dwi Pujiastuti.

⁴⁷ Romzi dan Muawanah, orangtua istri kedua Tony Chandra, wawancara tanggal 21 Juli 2019.

Dari penyampaian isi surat wasiat tersebut istri kedua menuntut harta pembagian waris yang ditinggalkan oleh Tony Candra. Tuntutan ini diajukan oleh Romzi dan Muawanah (orang tua dari Zuliati) yang menyatakan bahwa ia tidak tau bagaimana dengan pembagian harta waris itu karena perkawinanya tersebut tidak dilakukan secara resmi, Atas pembagian harta tersebut, istri kedua menerima pembagian hak waris tersebut dan istri pertamapun menerima pembagian hak waris, sehingga tidak terjadi persengketaan antara dua belah pihak dan persoalan tersebut dapat selesai dengan damai.



BAB IV

ANALISIS DATA

3. Analisis Fenomena Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Pembagian Hak Waris Istri Kedua di Desa Wayurang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Bagi orang yang hendak mencatatkan perkawinannya harus mempunyai Surat Pengantar dari desa selanjutnya KUA Kecamatan tempat mereka melangsungkan perkawinan secara Agama. Jika tidak memiliki surat pengantar tersebut, maka kami di Kantor Catatan Sipil tidak akan mencatatkan perkawinan tersebut”.

Di dalam Pasal 584 KUHPerdata meniru Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa: “Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat” Ketentuan Pasal 584 KUHPerdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Di samping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdata adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdata menyebutkan: “Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”

Dalam KUH Perdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdata) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum

memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Sesuai yang ditentukan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Suami atau istri tidak boleh mengaku perkawinannya dengan suami atau istri sebelumnya telah putus dengan alasan mereka telah berpisah selama bertahun-tahun. Perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan suami dan istri. Suatu perceraian hanya bisa diputuskan oleh hakim. Adapun sebab-sebab perceraian yang dapat dijadikan alasan perceraian di depan hakim menurut Pasal 19 PP no. 9 tahun 1975 antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhi;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 sebaiknya terlebih dahulu dilakukan isbat nikah agar adanya akta nikah diantara mereka dan nantinya berguna untuk pembuatan akta kelahiran dari anak-anak mereka supaya tidak ada kesulitan bagi anak-anak mereka dalam pengurusan administrasi disamping manapun agar mendapatkan perlindungan hukum. Pengaturan tentang harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 disana

tidak diatur secara rinci pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami sehingga menyulitkan bagi pencari keadilan maupun Majelis Hakim yang mengadili maupun yang memutus perkara.

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 direvisi untuk memberikan aturan yang lebih jelas secara hukum atas hak istri yang di poligami. Pasal Pasal itu ada kepastian hukum tentang pembagian harta bersama yang lebih rinci dalam perkawinan poligami, baik itu terjadi setelah cerai hidup dan cerai mati.

Pernikahan poligami yang diwarnai dengan modus nikah di bawah tangan tanpa izin istri pertama, tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hukum perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi orang Islam serta PP No. 10 tahun 1983 bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketiga peraturan hukum yang disebutkan di atas dalam beberapa pasalnya menyebutkan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi suami yang akan berpoligami adalah persetujuan istri. Sedangkan modus menikah dengan cara memalsukan identitas, atau menikah dengan cara meminta izin secara paksa dari istri pertama tentunya bertentangan dengan KUHP, karena dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan atau penipuan. Pemalsuan dan penipuan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran UU No. 23 tahun 2004 tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena yang dimaksud dengan bentuk KDRT dalam Pasal 6 tersebut tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga psikis, yang salah satu di antaranya berupa penipuan atau manipulasi yang berakibat kesengsaraan.

Berdasarkan kepada uraian di atas poligami di Desa Way Urang jika dilihat dari UUD No 1 tahun 1974 dan beberapa peraturan lainnya perkawinan tanpa izin istri adalah tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum dengan demikian dapat di katakana bahwa pernikahan antara Tony Candra dan Dwi Pujiastuti tidak di benarkan secara hukum.

4. Analisis Tentang Pembagian Hak Waris Istri Kedua dilihat dari Perspektif Hukum Islam

Pembagian harta waris menurut hukum Islam belum ada ketentuan secara pasti berapa bagian dari istri-istri yang dipoligami, namun untuk mendapatkan bagian dari harta warisan itu bisa dilaksanakan kalau para pihak yang bersengketa mau berdamai dan membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian.

Bagi istri yang ingin mendapatkan perlindungan hukum atas pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami harus memiliki bukti secara otentik agar hak-hak istri dapat terpenuhi. Bukti otentik yang dimaksud diatas adalah:

1. Surat nikah dari Istri-istri.
2. Akta kelahiran bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami.
3. Adanya Itsbad nikah (pernikahan yang dilakukan sebelum Tahun 1974 harus didaftarkan lagi)

Sebelum melakukan perkawinan poligami sebaiknya suami harus melakukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama setempat, untuk menghindari dan menentukan status perkawinan dan status dari anak-anak yang akan lahir dari perkawinan poligami tersebut. Setelah jelas kedudukan dan akta otentik dari perkawinan poligami itu suami harus mendudukan harta-harta perkawinan yang telah ada dari istri-istri sebelumnya dan menghitung harta bersama yang telah ada semasa perkawinan dengan melakukan perjanjian kawin. Si suami sebaiknya menjelaskan kepada istri-istri mereka tentang harta-harta yang didapat baik itu semasa istri pertama, istri kedua dan istri ketiga agar terhindar dari persengketaan antara mereka sepeninggal suami.

Dalam hubungan perkawinan di Indonesia, tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara satu orang individu dengan individu satunya lagi (suami-istri), melainkan juga melingkupi hubungan kekerabatan dua keluarga pasangan, mengenai harta pasangan suami-istri tersebut, hingga mengenai putusnya hubungan perkawinan berikut dengan akibat hukumnya.

Mengenai harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan tersebut, dapat kita lihat pasal 1 Kompilasi Hukum Islam ("KHI").

Pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Selanjutnya, mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami, kita dapat merujuk pada **Pasal 94 KHI**, dijelaskan bahwa:

1. *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.*
2. *Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.*

Jika kita merujuk pada ketentuan ini, maka jelas bahwa istri kedua tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama alm. suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tidak bergerak tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut.

Dalam Surat Penetapan Waris, memang sudah seharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk ke dalamnya, karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Adapun si istri kedua merupakan istri yang sah hingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua ini hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah antara si suami dengan istri keduanya ini.

Mengenai hak istri kedua atas harta bersama dalam pernikahannya tersebut, berdasarkan **Pasal 96 ayat (1) KHI** diatur bahwa;
Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Istri pertama mendapat 1/4 bagian (25%) dari harta suaminya, Istri kedua mendapat 1/8 (12,5%). Sedangkan sisanya di berikan kepada anak laki-laki istri kedua (ashobah). Istilah kerennya dalam hukum waris disebut dengan fara' waris.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta pribadi masing-masing karena perkawinan. Suami dan istri berhak dan berkuasa penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa : (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selain itu disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, “bila perkawinan

putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang dalam hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama, maka suami istri masing-masing membawa hartanya sendiri-sendiri. Dalam hukum adat, harta bersama ini lebih dikenal dengan istilah harta gono-gini atau guna-kaya. Dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama ini dibagi dua dan masing-masing mendapat separoh dari harta tersebut. Mengenai harta bersama, menurut Hukum Islam terdapat dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama, yaitu :

1. Tidak dikenal harta bersama dalam Lembaga Islam kecuali dengan syirkah (pendapat pertama) Menurut hukum Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri syarikatur rajuli filhayati yang artinya kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera hidup, maka antara suami istri dapat terjadi Syarikah Abdan (perkongsian tidak terbatas). Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian maka harta syirkah tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/istri turut berusaha dalam syirkah.

Tidak ada harta bersama menurut Hukum Islam antara suami istri, kecuali adanya syirkah, hal ini mungkin bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur'an antara lain :

“Bahwa suami kepala rumah tangga dan mempunyai kewajiban mutlak harus QS.4: 34)

(memberi nafkah baik kepada istri maupun anak-anak: “Berikanlah tempat tinggal yang layak kepada istri (para istri) kamu dimana kamu bertempat tinggal dan jangan menyusahkan” (QS.65: 6)

Karena istri mendapat perlindungan dari suami baik tentang nafkah, lahir, sandang, pangan, nafkah batin, moral dan materil maupun rumah tempat tinggal demikina juga biaya kesehatan, pemeliharaan serta pendidikan anakanak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala rumah tangga. Sebagaimana yang telah disebut pada ayat diatas, berarti sang istri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, maka menurut tafsiran ini tidak ada harta bersama diluar pembiayaan rumah tangga dan anak-anak, misalnya hadiah perhiasan, anting gelang, cincin dan yang serupa itu maka itulah yang menjadi hak istri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami, apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak milik suami, kecuali bila ada syirkah (perjanjian bahwa harta mereka bersatu).

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami istri menurut Hukum Islam.

Pendapat yang kedua ini disamping mengakui bahwa apa yang diatur UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang mengenai harta bersama seperti yang tersebut dalam pasal 35, 36 dan 37 UUP juga sesuai dengan kehendak atau aspirasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT berikut ini: “Bahwa perkawinan adalah

perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (miitsaaqan ghalizhaan)”(QS.4:21).

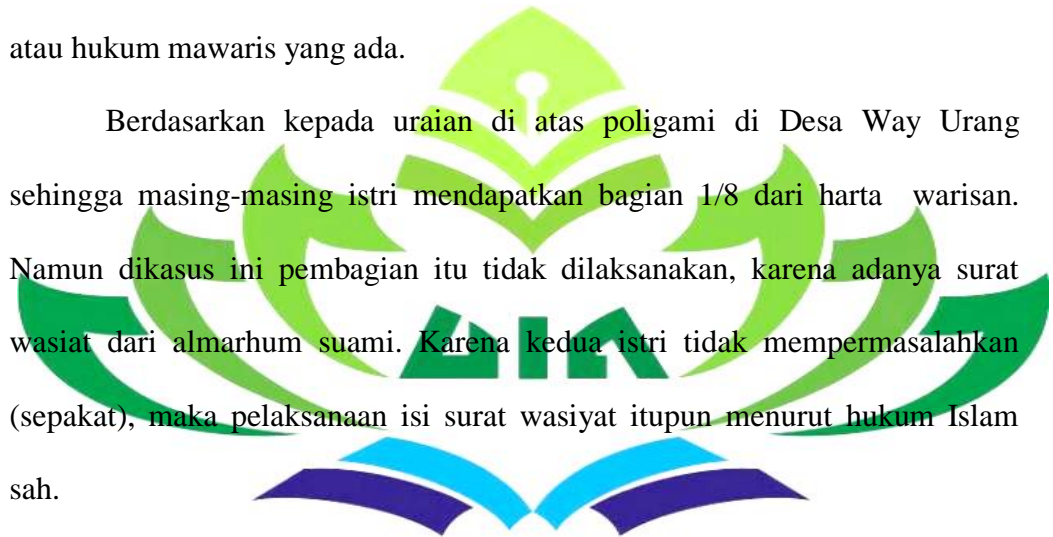
Menurut Hazairin, bahwa harta yang diperoleh suami istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka yang bekerja secara bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga bersama anak-anak dirumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak seperti yang telah diatur dalam QS. An-Nisa ayat 21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab kabul serta memenuhi persyaratan lain seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan i’lanun nikah sudah dapat dianggap syirkah antara suami istri.

Ketentuan-ketentuan di atas jika di terapkan pada kasus Tony Candra akan menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan ke 2 nya sah meski tidak di daftarkan di KUA. Keabsahan pernikahan tersebut dalam hukum Islam suatu perkawinan yang dihadiri oleh saksi, wali, dan kerabat dinyatakan sah meski tidak terdaftar di lembaga resmi. Karena itu poligami yang dilakukan oleh Tony Candra dalam Islam dinyatakan sah dan berakibat hukum sebagaimana perkawinan pada umumnya.

Sementara dari perspektif hukum Islam perkawinan poligami tidak ada ketentuan harus meminta izin istri. Hal ini dapat dilihat dari pada sisi rukun maupun syarat perkawinan di dalam Islam suatu perkawinan dipandang sah manakala telah cukup rukun dan syarat, dan tidak ada keharusan meminta izin istri pertama.

Dari fakta ini maka pernikahan yang terjadi antara Tony Chandra dan Dwi Pujiastuti secara agama sudah dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan yang dianjurkan oleh agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya wali, saksi-saksi dan tidak ada hal yang membuat perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Adapun dalam hal pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh saudara Tony Chandra menurut hukum Islam tidak mengenal harta gono gini dan yang adalah harta bersama, sehingga dibagi berdasarkan ketentuan atau hukum mawaris yang ada.

Berdasarkan kepada uraian di atas poligami di Desa Way Urang sehingga masing-masing istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ dari harta warisan. Namun dikasus ini pembagian itu tidak dilaksanakan, karena adanya surat wasiat dari almarhum suami. Karena kedua istri tidak mempermasalahkan (sepakat), maka pelaksanaan isi surat wasiyat itupun menurut hukum Islam sah.



BAB V

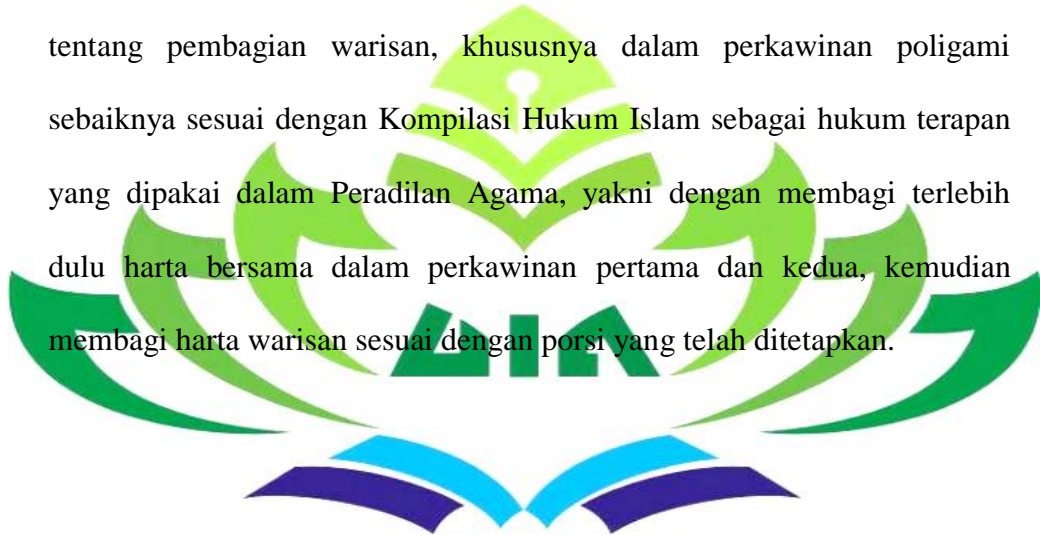
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Poligami tanpa izin istri pertama dan pembagian hak waris istri kedua dalam kasus Tony Candara di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berlangsung secara damai dan diselesaikan melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan ketika ia masih hidup dan walaupun menurut hukum positif poligami tersebut tidak sah karena tidak didaftarkan di KUA serta tidak memiliki izin dari istri pertama, sehingga pembagian hak waris tersebut berakibat tidak dipandang sebagai sah istri dan tidak berhak waris.
2. Dilihat dari perpektif hukum Islam kasus diatas Tony Candra dapat dikatakan sah perkawinannya karena memang dalam hukum Islam tidak ada ketentuan harus didaftarkan dilembaga resmi cukup selama perkawinan tersebut dihadiri oleh kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi dan pihak-pihak keluarga maka perkawinan tersebut sudah bisa dianggap sah dan berakibat bahwa istri yang kedua,walaupun dinikahi tanpa izin istri pertama tetap saja perkawinannya sah dan dia berhak untuk memperoleh pembagian waris,hanya saja dalam kasus ini Tony Candra pembagian hak waris tidak dilangsungkan melalui tata cara yang disebutkan dalam Islam (1/8) tetapi dilakukan berdasarkan surat wasiat dan itu diterima oleh kedua belah pihak maka itupun berlaku.

B. REKOMENDASI :

1. Kepada masyarakat pada umumnya Untuk menghindari terjadinya sengketa harta dalam perkawinan, khususnya pada perkawinan poligami harus dengan izin istri pertama, selanjutnya pada pernikahan kedua disarankan akta nikah pasangan suami istri disertai dengan ketentuan harta bersama dalam perjanjian perkawinan.
2. Kepada keluarga yang bersengketa hendaknya dalam memutus perkara tentang pembagian warisan, khususnya dalam perkawinan poligami sebaiknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan yang dipakai dalam Peradilan Agama, yakni dengan membagi terlebih dulu harta bersama dalam perkawinan pertama dan kedua, kemudian membagi harta warisan sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh, Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009

B. Buku

A Hamzah, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Cet. Revisi; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Min Adillati Al-Ahkam*, Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.

Amin Silalahi, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Surabaya, Batavia Press, 2005.

Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia, 2008

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, cetakan ke 7, 1996

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gria karya, cet-1, 1988

Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Singapura : Dakwah Printing, 1990

Padma D. Liman, *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)* Cet. 1; Malang: Wineka Media, 2011

Retno Wulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung, Alumni, 1979

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, 2005, Cet. ke-2

Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung, Pionir Jaya, 1992

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013

C. Jurnal

Jurnal "AL-Adalah", Vol.12, No 2 Tahun 2015 (Bandar Lampung): Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2015.

D. Undang-undang

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* Ed. 1 Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011

E. Hukum waris

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998) Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung, Pionir Jaya, 1992

Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung, Amrico, 1985

Muhamad Ali As-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung, CV.Diponegoro, 1995

F. Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Jazuli, Tokoh Agama Desa Way Urang pada tanggal 26 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Romzi dan Ibu Muawanah orang tua istri kedua pada tanggal 21 Juli 2019

